

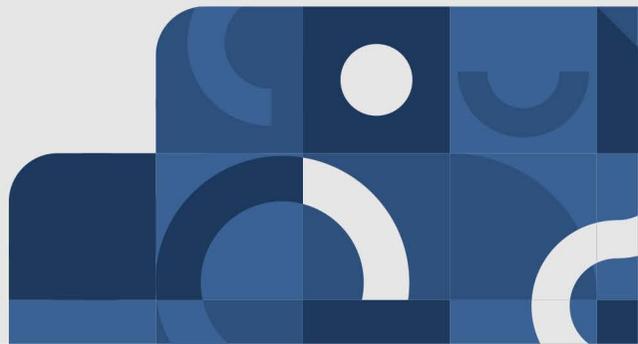
# STATISTIK

## POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI JAWA TENGAH

2019



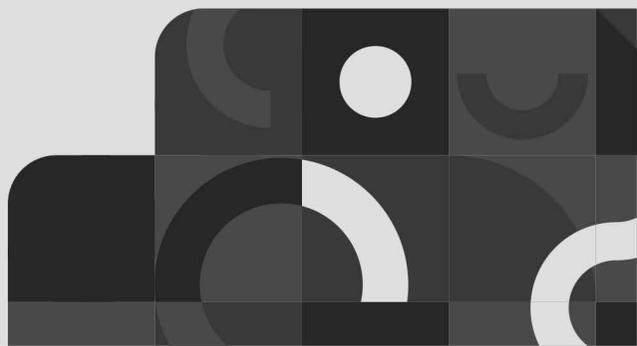
<https://www.bpsprov.jateng.go.id>



# STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

2019



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI JAWA TENGAH 2019

**ISSN** : 2715-3738  
**No. Publikasi** : 33520.2014  
**Katalog** : 4601001.33  
**Ukuran Buku** : 17,5 cm x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : xiv + 59 halaman

**Naskah :**

Bidang Statistik Sosial

**Penyunting:**

Bidang Statistik Sosial

**Gambar Kulit :**

Bidang Statistik Sosial

**Diterbitkan oleh :**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

**Dicetak oleh :**

CV. Surya Lestari

**Sumber Ilustrasi :**

unsplash.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## KATA PENGANTAR

Dinamika politik sedikit banyak memberi pengaruh pada kondisi keamanan, dimana stabilitas keduanya dibutuhkan dalam proses pembangunan. Politik dan keamanan saling terkait satu sama lain. Suatu ketika politik memengaruhi keamanan dan di waktu lain keamanan memengaruhi politik. Perkembangan politik dan keamanan yang dinamis tersebut memerlukan adanya data statistik yang bisa memotret dinamika politik dan keamanan.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2019 ini merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 yang bersumber dari dinas/instansi terkait.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna data secara cepat dan mudah. Disisi lain informasi tersebut akan memudahkan para pengambil kebijakan, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif untuk menyusun perencanaan, memonitor dan mengevaluasi pembangunan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, November 2020  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Tengah



Sentot Bangun Widoyono, MA



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
INFOGRAFIS .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Politik .....	3
1.1.2 Keamanan .....	3
1.2 Tujuan .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	4
BAB II. METODOLOGI .....	5
2.1 Sumber Data .....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	5
2.3 Konsep dan Definisi .....	6
2.3.1 Statistik Politik .....	6
2.3.2 Statistik Keamanan .....	9
BAB III. PENDUDUK DAN PARTISIPASI BERPOLITIK .....	11
3.1 Penduduk .....	11
3.2 Pemilu Dalam Lintasan Sejarah.....	13

	Halaman
3.3 Pemilihan Umum 2019 .....	14
3.3.1 Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI .....	15
3.3.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI .....	17
3.3.3 Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah .....	19
3.4 Anggota DPRD Jawa Tengah Hasil Pemilu 2019 .....	21
3.5 Peraturan Daerah .....	24
BAB IV. KEAMANAN .....	27
LAMPIRAN .....	31
DAFTAR PUSTAKA .....	57
REFERENSI INTERNET .....	59

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2019 .....	33
Tabel 2	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR RI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019 .....	34
Tabel 3	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tabahan (DPTb) pada Pemilu Presiden Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019 .....	35
Tabel 4	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tabahan (DPTb) pada Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019 .....	36
Tabel 5	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019 .....	37
Tabel 6	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019 .....	38
Tabel 7	Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019 .....	39

	Halaman
Tabel 8	Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019 ..... 40
Tabel 9	Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019..... 41
Tabel 10	Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019..... 42
Tabel 11	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 ..... 43
Tabel 12	Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2019..... 44
Tabel 13	Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Daerah Pemilihan, 2019..... 45
Tabel 14	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Asal Partai..... 46
Tabel 15	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, Periode 2019 – 2024 ..... 49
Tabel 16	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Pendidikan, Periode 2019 – 2024 ..... 50

	Halaman
Tabel 17	Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2017 – 2019 ..... 51
Tabel 18	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2017 - 2019..... 52
Tabel 19	Jumlah Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta Menurut Kabupaten/Kota, 2018 – 2019..... 53
Tabel 20	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resor di Provinsi Jawa Tengah, 2019 ..... 54
Tabel 21	Banyaknya Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total), Kejahatan yang Diselesaikan (Crime Cleared), Indeks Kejahatan yang Dilaporkan dan Indeks Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes 2019 ..... 55
Tabel 22	Banyaknya Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Wilayah Polda Jawa Tengah 2019... 56



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2019 .....	12
Gambar 3.2 Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Asal Partai, 2019 .....	22
Gambar 3.3 Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin, 2019.....	23
Gambar 3.4 Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Pendidikan Terakhir, 2019.....	24
Gambar 3.5 Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2017 – 2019 .....	25
Gambar 4.1 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2019.....	28
Gambar 4.2 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2019 .....	29



# MENILIK KONDISI POLITIK & KEAMANAN

JAWA TENGAH 2019

## Serba-Serbi Pilpres



## Hasil pilpres 2019



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah

## Serba-Serbi Keamanan



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes POLRI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan atau potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam realita politik Indonesia. Distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral di tangan presiden menjadi tuntutan orde reformasi. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Dari dua level tersebut yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat, kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Good Government and Clean Governance*).

Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM) melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM. Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakan hukum dan HAM yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Keberhasilan reformasi di bidang penegakan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Suatu kemustahilan bila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan terhadap munculnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Hal ini tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....". Salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini, yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Isu-isu bidang politik dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Permasalahan bidang politik dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global, dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak pada tumbuhnya harapan masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik dan keamanan.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Ada kalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan/monitoring dan evaluasi. Oleh karena diperlukan alat untuk memonitor dan melakukan evaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan, yaitu diperlukan adanya data statistik yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan antar wilayah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berupaya memenuhi kebutuhan indikator untuk memantau dan memonitor serta mengevaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah

dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan yang hasilnya dituangkan melalui publikasi. Output dari publikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah. Bagi pemerintah, informasi ini setidaknya dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

### **1.1.1 Politik**

Perkembangan politik merupakan sebuah kondisi yang mencakup seluruh ruang lingkup ilmu politik yang tumbuh, berkembang, atau mengalami kemunduran pada satu dekade kepemimpinan. Perkembangan politik di Indonesia sebagai bagian dari kehidupan sosial-politik secara umum mengalami pasang surut. Perkembangan politik sebagai salah satu tujuan berpolitik, menjadi bagian dari pengertian-pengertian yang dibuat maupun sikap-sikap yang berkembang untuk mewujudkan politik sebagai bagian dari kualitas suatu bangsa. Politik juga menjadi acuan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bertransformasi pada capaian sistem yang baik, dan terjaminnya suatu pemerintahan yang baik.

### **1.1.2 Keamanan**

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat pada status keamanan di suatu wilayah. Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, menuntut para pelaksana di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

## **1.2 Tujuan**

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2019 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik dan keamanan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Publikasi ini menyajikan data tentang politik serta gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang dirinci menurut Kabupaten/Kota.

## **BAB II METODOLOGI**

### **2.1 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2019 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Nara sumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Instansi provinsi sebagai nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan instansi kabupaten/kota yang menjadi nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota, Polres/Polresta di kabupaten/kota, Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota, Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.

### **2.2 Metode Pengumpulan Data**

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2019 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan administrasi instansi terkait secara berjenjang. BPS Kabupaten/Kota mengumpulkan data dari instansi terkait untuk kemudian dikirim ke BPS Provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat provinsi, BPS Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kompilasi data dari instansi yang menjadi nara sumber. Selanjutnya data yang sudah masuk dari kabupaten/kota serta data yang dikompilasi di tingkat provinsi diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam

lampiran pada publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2019 ini.

## 2.3 Konsep dan Definisi

### 2.3.1 Statistik Politik

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Otonomi daerah	Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah)	Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

	masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Desentralisasi	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Pemilihan Umum (Pemilu)	Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).
Pemilu DPR, DPD dan DPRD	Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).
Penduduk	Warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
Warga Negara Indonesia	Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
Pemilih	Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun

Partai Politik Peserta  
Pemilu

tetapi sudah/pernah kawin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yaitu:

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan,:

- Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai Politik;
- memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- memiliki kepengurusan di 75 persen (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,;
- memiliki kepengurusan di 50 persen (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota;
- mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Golongan putih (Golput)	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
Partisipasi Penduduk dalam Pemilu	Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

### 2.3.2 Statistik Keamanan

Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran	Perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia
Peristiwa yang dilaporkan	Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.</li> <li>❖ Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas <i>Plichtmatigheid</i>.</li> <li>❖ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.</li> <li>❖ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.</li> <li>❖ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.</li> </ul>
Kerugian	Hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/- pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
Korban Kejahatan	Seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan

## **BAB III**

### **PENDUDUK DAN PARTISIPASI BERPOLITIK**

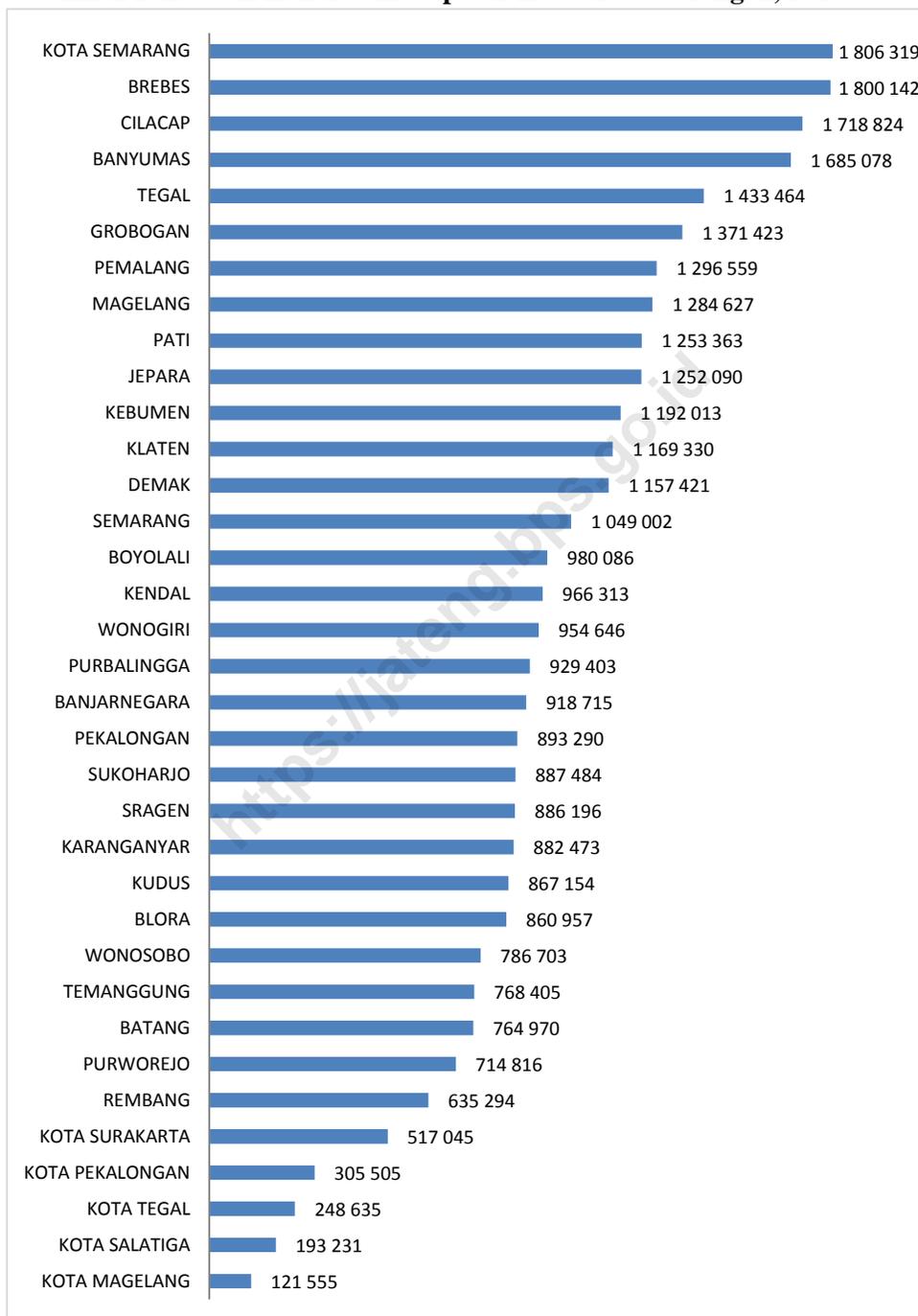
#### **3.1 Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Begitu pula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Jumlah penduduk dalam kegiatan politik merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara, sedangkan dalam bidang keamanan, semakin banyak penduduk semakin besar pula potensi permasalahan yang akan timbul.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai 32.800,69 km<sup>2</sup>, secara administratif terbagi menjadi 35 kabupaten/kota, yaitu 29 kabupaten dan 6 kota. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Cilacap dengan luas 2.124,47 km<sup>2</sup>, disusul Kabupaten Grobogan dengan luas 2.013,86 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Brebes dengan luas 1.902,37 km<sup>2</sup>. Sebaliknya, tiga kota dengan luas terkecil adalah Kota Magelang dengan luas 16,06 km<sup>2</sup>, Kota Tegal dengan luas 39,68 km<sup>2</sup>, dan Kota Pekalongan dengan luas 45,25 km<sup>2</sup>. (Lampiran Tabel 1).

Dari luasan wilayah tersebut, pada tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah dihuni sekitar 34,553 juta jiwa. Kota Semarang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 1,806 juta jiwa. Sebaliknya Kota Magelang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 122 ribu jiwa (Gambar 1). Dengan melihat luas wilayah serta besaran jumlah penduduk, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya dalam memenangkan pemilu, sebab rakyat memegang kedaulatan secara penuh. Suara rakyat yang disalurkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sangat menentukan.

**Gambar 3.1**  
**Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2019**



*Sumber: Hasil Proyeksi SUPAS 2015, BPS Provinsi Jawa Tengah*

### 3.2 Pemilu Dalam Lintasan Sejarah

Dinamika politik Indonesia secara umum dibagi menjadi tiga masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Orde Lama merupakan masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Tahun 1955, lembaga pemerintahan DPR dan Anggota Konstituante dibentuk melalui pemilu. Upaya ini dilakukan sekalipun pada masa itu situasi keamanan masih banyak pergolakan. Situasi politik Indonesia pada masa itu juga belum stabil, dimana terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 (tujuh) kali.

Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Sistem pemerintahan pada masa ini adalah presidensiil, dengan ciri presiden berperan sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Pemerintah menjalankan dwifungsi ABRI, di mana TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Pada masa ini pula terjadi pembatasan Partai Politik menjadi dua partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta satu organisasi masyarakat, yaitu Golongan Karya (Golkar), yang dilakukan untuk membatasi pertentangan ideologi.

Selama masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Aparatur negara terlibat secara aktif dalam kontestasi pemilu melalui Golongan Karya. Ketidakpuasan pada pemerintahan Orde Baru memunculkan gerakan protes menuntut reformasi, dan memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Pada masa reformasi terjadi perubahan tatanan politik di Indonesia. Ini ditandai dengan berbagai regulasi yang mendukung Indonesia menjadi lebih demokratis seperti UU No 2/1999 tentang Partai Politik, UU No 3/1999 tentang Pemilihan Umum, UU No 9/1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No 40/1999 tentang Pers. Jika pada masa Orde Baru presiden memiliki kekuasaan

yang sangat besar, maka pada era reformasi terdapat perimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masa jabatan presiden dan wakil presiden juga dibatasi, maksimal dua kali masa jabatan sebagaimana tertuang dalam amandemen UUD 1945 pada Pasal 7 tentang Jabatan Presiden. Pada era Reformasi juga digunakan sistem multipartai, sehingga muncul partai-partai baru setiap diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu).

### **3.3 Pemilihan Umum 2019**

Keberadaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti *et al*, 2008:12).

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu Pemilu, yaitu pemilu legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2004 Indonesia mengenal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan; Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah.

Tahun 2019 untuk pertama kali dilakukan secara serentak pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden. Upaya ini sejalan dengan semangat penyederhanaan pemilu yang digagas sejak beberapa tahun sebelumnya. Pilkada misalnya, telah didesain agar dapat dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan pemilu ini dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dari sisi waktu, tenaga, dan biaya.

Secara teknis, Pemilu 2019 juga dilaksanakan dengan beberapa perubahan. Diantaranya adalah penghitungan suara dengan metode *Sainte Lague*<sup>1)</sup>,

menggantikan metode bilangan pembagi pemilih (BPP) atau Kuota *Hare* <sup>2)</sup>, yang telah digunakan pada beberapa pemilu sebelumnya. Untuk mengakomodasi bertambahnya beban petugas pada pemilu serentak, jumlah pemilih di TPS juga diturunkan dari maksimal 500 menjadi 300 pemilih saja.

### 3.3.1. Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2019 diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 17 April 2019, yaitu untuk memilih 575 anggota DPR, 136 anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia periode 2019-2024.

Pemilu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur melalui Pemilu, antara lain melalui penghitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Di negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula. Tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam pemilu DPR RI 2019 ditunjukkan di Tabel 10 dalam lampiran.

<sup>1)</sup> *Metode Sainte Lague masuk ke dalam kategori Metode Divisor, yaitu menggunakan nilai rata-rata tertinggi atau biasa disebut BP (Bilangan Pembagi). Artinya, kursi-kursi yang tersedia pertama-tama akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai jumlah suara rata-rata tertinggi, kemudian rata-rata tersebut akan terus menurun berdasarkan nilai bilangan pembagi. Prosedur ini akan terus berlaku sampai semua kursi terbagi habis.*

<sup>2)</sup> *Kuota Hare adalah metode konversi suara dengan cara dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah (vote atau v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik (seat atau s).*

Sistem pemilu 2019 juga menerapkan konsep daerah pemilihan (Dapil). Pembentukan Dapil Pemilu 2019 terdapat dalam Lampiran UU No. 7/2017. Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah untuk anggota DPR RI 2019-2024 dibagi menjadi sepuluh Dapil, yakni:

- Dapil Jateng I meliputi: Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI.
- Dapil Jateng II meliputi: Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPR RI.
- Dapil Jateng III meliputi: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar sembilan kursi DPR RI.
- Dapil Jateng IV meliputi: Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPR RI.
- Dapil Jateng V meliputi: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI.
- Dapil Jateng VI meliputi: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI.
- Dapil Jateng VII meliputi: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPR RI.
- Dapil Jateng VIII meliputi: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI.
- Dapil Jateng IX meliputi: Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPR RI.

- Dapil Jateng X meliputi: Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPR RI.

Tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah pada pelaksanaan pemilu DPR RI 2019 mencapai 80,04 persen. Daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi berada di Kota Salatiga dengan tingkat partisipasi 90,35 persen, disusul Kota Magelang (90,00 persen) dan Kabupaten Rembang (88,29 persen). Sedangkan partisipasi terendah pada pemilu legislatif 2019 berada di Kabupaten Brebes dengan tingkat partisipasi sekitar 70,69 persen, disusul Kabupaten Pemalang (72,37 persen) (Lampiran Tabel 10).

Kondisi ini perlu dicari akar permasalahannya, apakah disebabkan karena sosialisasi pelaksanaan pemilu yang kurang dipahami oleh masyarakat, penduduk yang tidak lagi respon terhadap pemilu, atau data pemilih yang bermasalah. Kurangnya partisipasi penduduk untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota legislatif sebagai wakil rakyat, seharusnya bisa menjadi perhatian ke depan untuk menyukseskan pemilu. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu dan dibutuhkan profesionalisme panitia penyelenggara pemilu.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga bagian dari MPR yang berasal dari wakil-wakil daerah yang berasal dari semua provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diundangkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22 C dan 22 D. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang dan dipilih melalui pemilu.

### **3.3.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI**

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak

kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia (Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2019 (Pilpres 2019) dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2019-2024. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung yang keempat di Indonesia. Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 20 September 2019 dan pengundian nomor urutnya dilakukan pada 21 September 2018.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon (Paslon). Paslon nomor urut 01 adalah Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin. Pasangan ini diusung oleh sepuluh partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai lain yang mendukung tetapi tidak memiliki kursi di parlemen yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sementara itu, paslon nomor urut 02 adalah H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno. Paslon ini diusung oleh enam partai politik, yaitu: Partai

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai lain yang mendukung tetapi tidak memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Garuda dan Partai Berkarya.

Paslon yang memperoleh suara terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Paslon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, dengan perolehan suara sebesar 16.825.511 suara atau sebesar 77,29 persen dari total suara. Sementara itu, Paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno, memperoleh 4.944.447 suara atau sebesar 22,71 persen dari total suara (Tabel 12).

Jumlah suara sah dan tidak sah pada Pemilu presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden 2019 (Pilpres 2019) yang berlangsung di Jawa Tengah terdapat 2,71 persen atau 606.514 suara yang dinyatakan tidak sah (Lampiran Tabel 11).

### **3.3.3. Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Pada Pemilu legislatif tahun 2019, jumlah kontestan peserta pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 16 (enam belas) partai politik, yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Daerah Pemilihan (Dapil) untuk anggota DPRD 2019-2024 dibagi menjadi 13 Dapil, yakni:

- Dapil I : Kota Semarang. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar enam kursi DPRD Jawa Tengah
- Dapil II meliputi: Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar tujuh kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil III meliputi: Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar sepuluh kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil IV meliputi: Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar enam kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil V meliputi: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora,. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil VI meliputi: Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar sepuluh kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil VII meliputi: Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar sepuluh kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil VIII meliputi: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil IX meliputi: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar delapan kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil X meliputi: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar sebelas kursi DPRD Jawa Tengah
- Dapil XI meliputi: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar dua belas kursi DPRD Jawa Tengah.

- Dapil XII meliputi: Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar dua belas kursi DPRD Jawa Tengah.
- Dapil XIII meliputi: Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Untuk Dapil ini diperebutkan sekitar dua belas kursi DPRD Jawa Tengah.

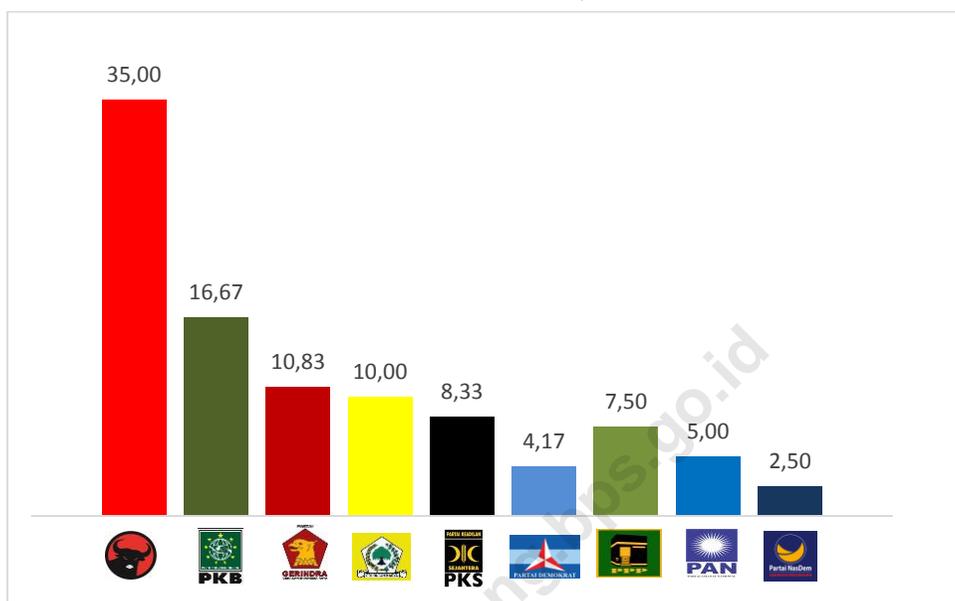
Tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah pada pelaksanaan pemilu DPRD Jawa Tengah 2019 mencapai 79,77 persen. Daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi berada di Kota Salatiga dengan tingkat partisipasi 90,31 persen, disusul Kota Magelang (89,89 persen) dan Kabupaten Rembang (88,28 persen). Sedangkan partisipasi terendah pada pemilu DPRD Jawa Tengah 2019 berada di Kabupaten Brebes dengan tingkat partisipasi sekitar 70,96 persen, disusul Kabupaten Cilacap (71,75 persen) (Lampiran Tabel 13).

#### **3.4. Anggota DPRD Jawa Tengah Hasil Pemilu 2019**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, disingkat DPRD Jawa Tengah atau DPRD Jateng, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, merupakan anggota legislatif pilihan rakyat atau wakil rakyat yang mewakili aspirasi dari rakyat. Anggota DPRD Jawa Tengah yang sedang menjabat saat ini merupakan hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 3 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, di Aula Lantai IV Gedung Berlian, Semarang.

Komposisi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 terdiri dari 9 partai politik dimana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 42 kursi, diikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menempakan wakilnya di 20 kursi dan Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) yang menduduki 13 kursi dalam anggota DPRD Jawa Tengah (Gambar 3.2).

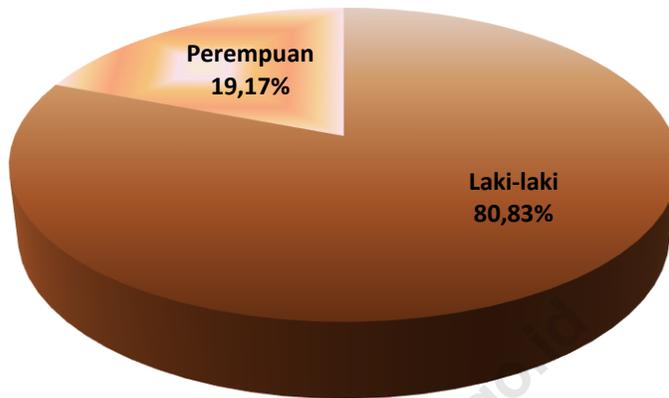
**Gambar 3.2**  
**Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah**  
**Menurut Asal Partai, 2019**



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterwakilan perempuan dalam anggota dewan akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang dewan, terutama keputusan yang menyangkut keberpihakan terhadap perempuan. Secara umum semua partai politik peserta pemilu telah mengusung perempuan sebagai caleg, sesuai dengan undang-undang pemilu sebanyak 30 persen dari total calon yang ada. Namun demikian jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berjenis kelamin perempuan hanya 19,17 persen (23 orang), sedangkan laki-laki 80,83 persen (97 orang).

**Gambar 3.3**  
**Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah**  
**Menurut Jenis Kelamin, 2019**

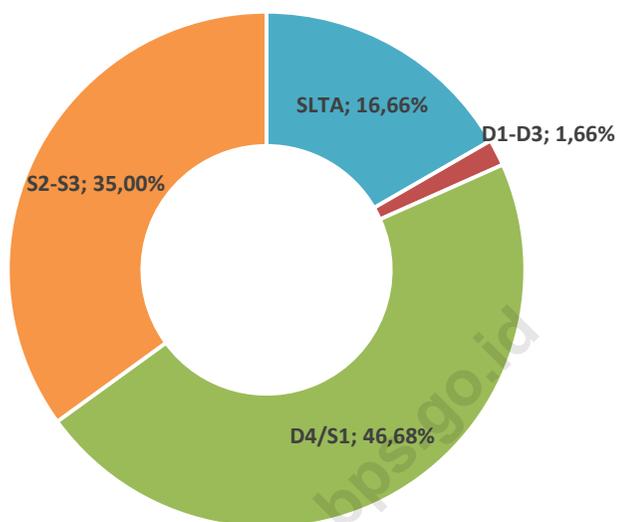


*Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2019*

Dilihat dari asal partainya, persentase terbesar anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mencapai 33,33 persen. Namun demikian tidak ada satu pun anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Pada Gambar 3.4 terlihat bahwa secara keseluruhan, tingkat pendidikan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sekitar 35 persen (42 orang) adalah tamatan S2/S3, sekitar 46,68 persen (56 orang) berpendidikan tamat Sarjana baik DIV maupun S1, dan 1,67 persen (2 orang) tamat D1-D3. Namun masih terdapat sekitar 16,66 persen (20 orang) yang berpendidikan setingkat SLTA. Bila dilihat dari asal partainya, persentase anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tamat SLTA berasal dari PDI Perjuangan sebesar 9,17 persen (11 Orang).

**Gambar 3.4**  
**Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah**  
**Menurut Pendidikan Terakhir, 2019**



*Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2019*

Tingkat pendidikan yang tinggi para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan pemikiran yang lebih cemerlang dalam mengambil keputusan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya dengan semakin tinggi pendidikan akan mewarnai pola pikir dan cara pandang anggota DPRD terhadap suatu permasalahan dan dalam mengambil keputusan.

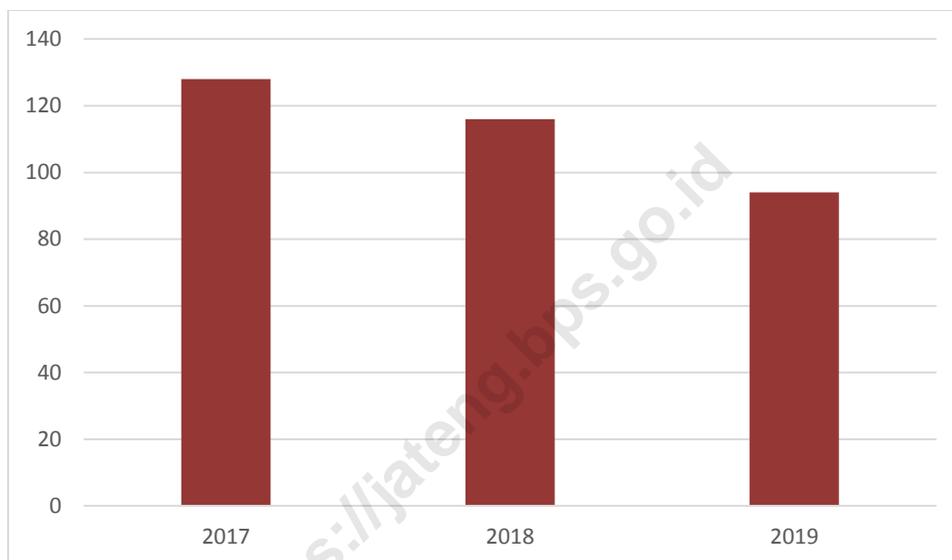
### **3.5 Peraturan Daerah**

Peraturan daerah yang efektif dan efisien akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat bersama karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib daerah. Banyaknya jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

Dari sejumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan, di dalamnya termasuk perda yang merupakan inisiatif DPRD. Perda Inisiatif merupakan perda yang dirancang berdasarkan inisiatif dari DPRD. Secara total, jumlah perda

inisiatif DPRD Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah selama tahun 2017 sebanyak 128 perda. Pada tahun 2018 perda inisiatif DPRD yang dihasilkan sebanyak 116 perda dan 94 perda di tahun 2019 (Gambar 3.5).

**Gambar 3.5**  
**Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2017 – 2019**



Sumber: Biro Hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah



## **BAB IV KEAMANAN**

Rasa aman (*secure*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Menurut falsafah, dalam kehidupan negara aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri dari ancaman dari luar dan dalam negeri, negara tidak dapat mempertahankan hidupnya, termasuk didalamnya permasalahan hukum yang mengaturnya yang berhubungan erat dengan keamanan.

Data dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin banyak tindak pidana pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

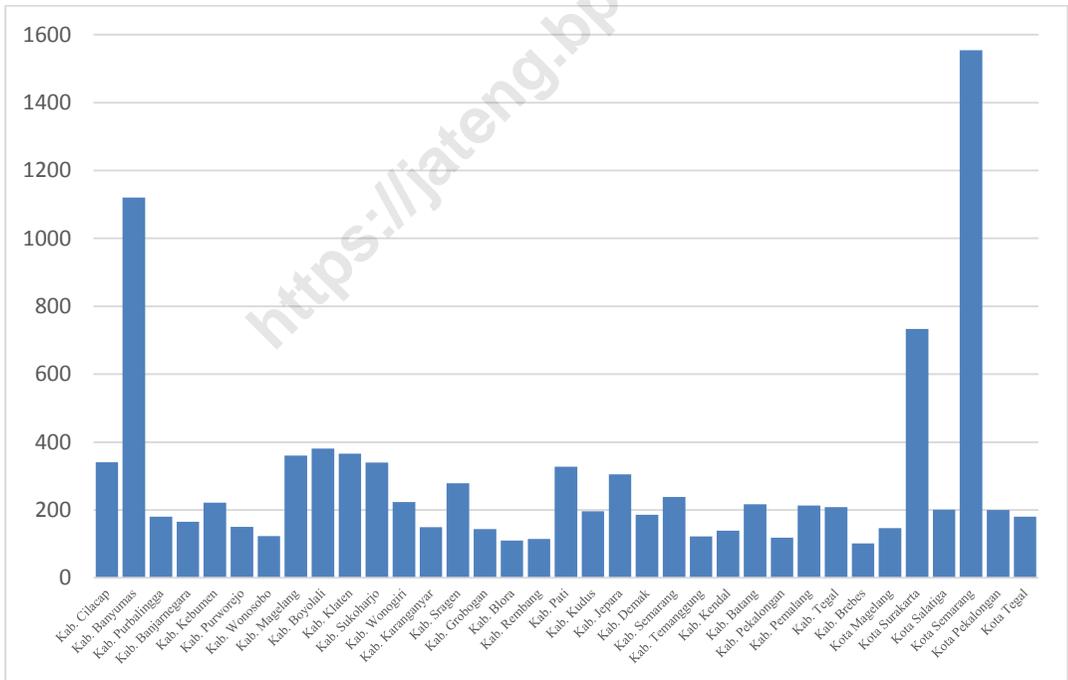
Secara umum indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Berdasarkan data Biro Biro Pengendalian Operasi, Mabes POLRI, tindak kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah selama tahun 2019 sebanyak 10.224 kasus pada tahun 2019. (Lampiran Tabel 20).

Laporan Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Polri menekan jumlah tindak kriminalitas selama tahun 2019 tidak terlepas dari peranan Polri yang berupaya meningkatkan kinerjanya, dapat dilihat dari jumlah Polsek/Polsekta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 551 Polsek/Polsekta (Lampiran Tabel 19). Di pihak lain, meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keamanan

lingkungan dan stabilitas perekonomian nasional turut menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Gambar 4.1 menyajikan jumlah kejadian tindak kejahatan dilaporkan yang terjadi di kabupaten/kota se- Jawa Tengah selama tahun 2019, berkisar antara 110 – 1.554 kasus. Nampak bahwa tiga kabupaten/kota yang paling rawan terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling tinggi selama tahun 2019 berturut-turut meliputi Kota Semarang (1.554 kasus), Kabupaten Banyumas (1.120 kasus), dan Kota Surakarta (733 kasus).. Sebaliknya tiga kabupaten/kota yang paling aman terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling rendah selama tahun 2019 berturut-turut ditempati Kabupaten Brebes (102 kasus), Kabupaten Blora (110 kasus), dan Kabupaten Rembang (115 kasus).

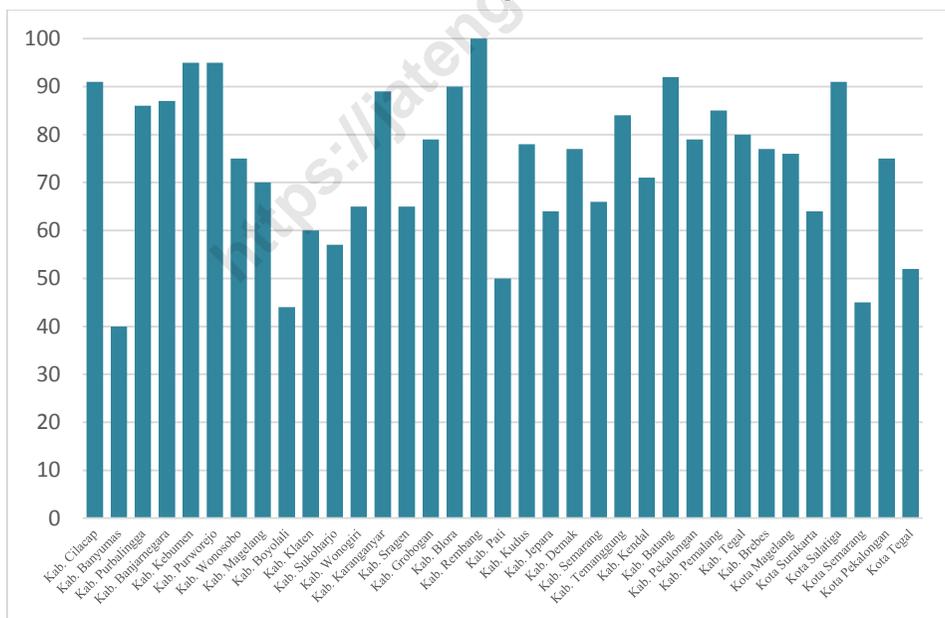
**Gambar 4.1**  
**Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2019**



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes POLRI

Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tahun 2019, sekitar 65 persen perkara tindak pidana dapat diselesaikan (*clearance rate*). Gambar 4.2 menyajikan persentase penyelesaian tindak kejahatan yang terjadi di kabupaten/kota se- Jawa Tengah selama tahun 2019, berkisar antara 40 – 100 persen. Nampak bahwa tiga kabupaten/kota dengan penyelesaian tindak kejahatan tertinggi selama tahun 2019 berturut-turut adalah Kabupaten Rembang (100 persen), Kabupaten Purworejo (95 persen), dan Kabupaten Kebumen (95 persen). Sebaliknya tiga kabupaten/kota dengan penyelesaian tindak kejahatan paling rendah selama tahun 2019 berturut-turut adalah Kabupaten Banyumas (40 persen), Kabupaten Boyolali (44 persen), dan Kota Semarang (45 persen).

**Gambar 4.2**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2019**



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes POLRI



# Lampiran

<https://jateng.bps.go.id>



Tabel 1

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2019

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	2 124,47	24	284	1 718 824
02	Kab. Banyumas	1 335,30	27	331	1 685 078
03	Kab. Purbalingga	677,55	18	239	929 403
04	Kab. Banjarnegara	1 023,73	20	278	918 715
05	Kab. Kebumen	1 211,74	26	460	1 192 013
06	Kab. Purworejo	1 091,49	16	494	714 816
07	Kab. Wonosobo	981,41	15	265	786 703
08	Kab. Magelang	1 102,93	21	372	1 284 627
09	Kab. Boyolali	1 008,45	22	267	980 086
10	Kab. Klaten	658,22	26	401	1 169 330
11	Kab. Sukoharjo	489,12	12	167	887 484
12	Kab. Wonogiri	1 793,67	25	294	954 646
13	Kab. Karanganyar	775,44	17	177	882 473
14	Kab. Sragen	941,54	20	208	886 196
15	Kab. Grobogan	2 013,86	19	280	1 371 423
16	Kab. Blora	1 804,59	16	295	860 957
17	Kab. Rembang	887,13	14	294	635 294
18	Kab. Pati	1 489,19	21	406	1 253 363
19	Kab. Kudus	425,15	9	132	867 154
20	Kab. Jepara	1 059,25	16	195	1 252 090
21	Kab. Demak	900,12	14	249	1 157 421
22	Kab. Semarang	950,21	19	235	1 049 002
23	Kab. Temanggung	837,71	20	289	768 405
24	Kab. Kendal	1 118,13	20	286	966 313
25	Kab. Batang	788,65	15	248	764 970
26	Kab. Pekalongan	837	19	285	893 290
27	Kab. Pemasang	1 118,03	14	222	1 296 559
28	Kab. Tegal	876,1	18	287	1 433 464
29	Kab. Brebes	1 902,37	17	297	1 800 142
30	Kota Magelang	16,06	3	17	121 555
31	Kota Surakarta	46,01	5	54	517 045
32	Kota Salatiga	57,36	4	23	193 231
33	Kota Semarang	373,78	16	177	1 806 319
34	Kota Pekalongan	45,25	4	27	305 505
35	Kota Tegal	39,68	4	27	248 635
Provinsi Jawa Tengah		32 800,69	576	8 562	34 552 531

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

\*) Hasil Proyeksi SUPAS 2015, BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2

Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR RI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	746 142	50,13	742 354	49,87	1 488 496
02	Kab. Banyumas	674 636	49,94	676 345	50,06	1 350 981
03	Kab. Purbalingga	378 042	50,26	374 169	49,74	752 211
04	Kab. Banjarnegara	396 370	50,55	387 800	49,45	784 170
05	Kab. Kebumen	541 468	50,48	531 240	49,52	1 072 708
06	Kab. Purworejo	305 167	49,65	309 444	50,35	614 611
07	Kab. Wonosobo	345 081	50,81	334 017	49,19	679 098
08	Kab. Magelang	492 312	49,78	496 567	50,22	988 879
09	Kab. Boyolali	401 136	49,62	407 333	50,38	808 469
10	Kab. Klaten	494 152	49,19	510 374	50,81	1 004 526
11	Kab. Sukoharjo	331 578	49,52	337 968	50,48	669 546
12	Kab. Wonogiri	430 476	49,49	439 348	50,51	869 824
13	Kab. Karanganyar	343 587	49,44	351 440	50,56	695 027
14	Kab. Sragen	383 736	49,39	393 164	50,61	776 900
15	Kab. Grobogan	557 711	49,69	564 558	50,31	1 122 269
16	Kab. Blora	348 985	49,37	357 955	50,63	706 940
17	Kab. Rembang	242 801	49,75	245 241	50,25	488 042
18	Kab. Pati	508 799	49,17	525 992	50,83	1 034 791
19	Kab. Kudus	310 632	49,26	319 986	50,74	630 618
20	Kab. Jepara	437 546	49,92	438 944	50,08	876 490
21	Kab. Demak	438 861	50,02	438 482	49,98	877 343
22	Kab. Semarang	383 734	49,26	395 259	50,74	778 993
23	Kab. Temanggung	299 699	49,76	302 610	50,24	602 309
24	Kab. Kendal	389 474	50,02	389 156	49,98	778 630
25	Kab. Batang	302 837	49,95	303 453	50,05	606 290
26	Kab. Pekalongan	366 461	50,49	359 329	49,51	725 790
27	Kab. Pemalang	566 973	50,49	555 885	49,51	1 122 858
28	Kab. Tegal	611 049	50,66	595 131	49,34	1 206 180
29	Kab. Brebes	772 345	50,52	756 304	49,48	1 528 649
30	Kota Magelang	43 757	47,91	47 574	52,09	91 331
31	Kota Surakarta	205 037	48,59	216 962	51,41	421 999
32	Kota Salatiga	65 482	48,45	69 667	51,55	135 149
33	Kota Semarang	570 520	48,51	605 554	51,49	1 176 074
34	Kota Pekalongan	112 837	49,96	113 022	50,04	225 859
35	Kota Tegal	101 945	49,77	102 907	50,23	204 852
Provinsi Jawa Tengah		13 901 368	49,83	13 995 534	50,17	27 896 902

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3

Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tabahan (DPTb) pada Pemilu Presiden Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	2 978	60,47	1 947	39,53	4 925
02	Kab. Banyumas	4 515	46,61	5 171	53,39	9 686
03	Kab. Purbalingga	2 002	56,06	1 569	43,94	3 571
04	Kab. Banjarnegara	1 054	58,14	759	41,86	1 813
05	Kab. Kebumen	1 616	47,20	1 808	52,80	3 424
06	Kab. Purworejo	1 016	47,19	1 137	52,81	2 153
07	Kab. Wonosobo	984	46,61	1 127	53,39	2 111
08	Kab. Magelang	1 587	50,78	1 538	49,22	3 125
09	Kab. Boyolali	1 577	47,53	1 741	52,47	3 318
10	Kab. Klaten	1 402	46,29	1 627	53,71	3 029
11	Kab. Sukoharjo	1 037	38,78	1 637	61,22	2 674
12	Kab. Wonogiri	1 069	57,75	782	42,25	1 851
13	Kab. Karanganyar	1 114	44,38	1 396	55,62	2 510
14	Kab. Sragen	934	49,81	941	50,19	1 875
15	Kab. Grobogan	484	44,65	600	55,35	1 084
16	Kab. Blora	633	54,48	529	45,52	1 162
17	Kab. Rembang	689	53,08	609	46,92	1 298
18	Kab. Pati	1 035	44,98	1 266	55,02	2 301
19	Kab. Kudus	1 220	46,37	1 411	53,63	2 631
20	Kab. Jepara	1 243	58,41	885	41,59	2 128
21	Kab. Demak	1 104	53,77	949	46,23	2 053
22	Kab. Semarang	1 594	48,73	1 677	51,27	3 271
23	Kab. Temanggung	729	47,31	812	52,69	1 541
24	Kab. Kendal	1 155	54,30	972	45,70	2 127
25	Kab. Batang	1 226	63,85	694	36,15	1 920
26	Kab. Pekalongan	849	51,08	813	48,92	1 662
27	Kab. Pemasang	736	49,03	765	50,97	1 501
28	Kab. Tegal	939	51,76	875	48,24	1 814
29	Kab. Brebes	1 131	51,67	1 058	48,33	2 189
30	Kota Magelang	1 036	52,46	939	47,54	1 975
31	Kota Surakarta	2 469	42,49	3 342	57,51	5 811
32	Kota Salatiga	1 267	40,87	1 833	59,13	3 100
33	Kota Semarang	8 776	41,65	12 294	58,35	21 070
34	Kota Pekalongan	785	62,60	469	37,40	1 254
35	Kota Tegal	672	56,19	524	43,81	1 196
Provinsi Jawa Tengah		52 657	48,24	56 496	51,76	109 153

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4

Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tabahan (DPTb) pada Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	2 978	60,47	1 947	39,53	4 925
02	Kab. Banyumas	4 515	46,61	5 171	53,39	9 686
03	Kab. Purbalingga	2 002	56,06	1 569	43,94	3 571
04	Kab. Banjarnegara	1 054	58,14	759	41,86	1 813
05	Kab. Kebumen	1 616	47,20	1 808	52,80	3 424
06	Kab. Purworejo	1 016	47,19	1 137	52,81	2 153
07	Kab. Wonosobo	984	46,61	1 127	53,39	2 111
08	Kab. Magelang	1 587	50,78	1 538	49,22	3 125
09	Kab. Boyolali	1 577	47,53	1 741	52,47	3 318
10	Kab. Klaten	1 402	46,29	1 627	53,71	3 029
11	Kab. Sukoharjo	1 037	38,78	1 637	61,22	2 674
12	Kab. Wonogiri	1 069	57,75	782	42,25	1 851
13	Kab. Karanganyar	1 114	44,38	1 396	55,62	2 510
14	Kab. Sragen	934	49,81	941	50,19	1 875
15	Kab. Grobogan	484	44,65	600	55,35	1 084
16	Kab. Blora	633	54,48	529	45,52	1 162
17	Kab. Rembang	689	53,08	609	46,92	1 298
18	Kab. Pati	1 035	44,98	1 266	55,02	2 301
19	Kab. Kudus	1 220	46,37	1 411	53,63	2 631
20	Kab. Jepara	1 243	58,41	885	41,59	2 128
21	Kab. Demak	1 104	53,77	949	46,23	2 053
22	Kab. Semarang	1 594	48,73	1 677	51,27	3 271
23	Kab. Temanggung	729	47,31	812	52,69	1 541
24	Kab. Kendal	1 155	54,30	972	45,70	2 127
25	Kab. Batang	1 226	63,85	694	36,15	1 920
26	Kab. Pekalongan	863	51,74	805	48,26	1 668
27	Kab. Pemasang	736	49,03	765	50,97	1 501
28	Kab. Tegal	939	51,76	875	48,24	1 814
29	Kab. Brebes	1 131	51,67	1 058	48,33	2 189
30	Kota Magelang	1 036	52,46	939	47,54	1 975
31	Kota Surakarta	2 469	42,49	3 342	57,51	5 811
32	Kota Salatiga	1 267	40,87	1 833	59,13	3 100
33	Kota Semarang	8 776	41,71	12 265	58,29	21 041
34	Kota Pekalongan	785	62,60	469	37,40	1 254
35	Kota Tegal	672	56,19	524	43,81	1 196
Provinsi Jawa Tengah		52 671	48,26	56 459	51,74	109 130

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 5

Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	6 106	47,77	6 676	52,23	12 782
02	Kab. Banyumas	6 376	48,66	6 726	51,34	13 102
03	Kab. Purbalingga	2 418	49,41	2 476	50,59	4 894
04	Kab. Banjarnegara	2 352	46,61	2 694	53,39	5 046
05	Kab. Kebumen	2 541	43,95	3 241	56,05	5 782
06	Kab. Purworejo	1 575	41,11	2 256	58,89	3 831
07	Kab. Wonosobo	2 725	41,92	3 775	58,08	6 500
08	Kab. Magelang	2 501	39,52	3 828	60,48	6 329
09	Kab. Boyolali	3 659	41,05	5 255	58,95	8 914
10	Kab. Klaten	3 374	40,10	5 040	59,90	8 414
11	Kab. Sukoharjo	5 506	43,92	7 031	56,08	12 537
12	Kab. Wonogiri	1 772	50,99	1 703	49,01	3 475
13	Kab. Karanganyar	3 550	44,40	4 446	55,60	7 996
14	Kab. Sragen	3 966	44,51	4 945	55,49	8 911
15	Kab. Grobogan	2 122	45,60	2 532	54,40	4 654
16	Kab. Blora	2 542	46,99	2 868	53,01	5 410
17	Kab. Rembang	1 986	47,91	2 159	52,09	4 145
18	Kab. Pati	3 730	45,94	4 389	54,06	8 119
19	Kab. Kudus	2 036	45,89	2 401	54,11	4 437
20	Kab. Jepara	2 518	44,27	3 170	55,73	5 688
21	Kab. Demak	4 114	46,95	4 649	53,05	8 763
22	Kab. Semarang	2 493	44,49	3 111	55,51	5 604
23	Kab. Temanggung	1 723	45,97	2 025	54,03	3 748
24	Kab. Kendal	2 312	40,93	3 337	59,07	5 649
25	Kab. Batang	2 014	47,21	2 252	52,79	4 266
26	Kab. Pekalongan	2 979	50,30	2 944	49,70	5 923
27	Kab. Pemalang	9 520	47,63	10 468	52,37	19 988
28	Kab. Tegal	19 091	47,22	21 337	52,78	40 428
29	Kab. Brebes	10 669	48,63	11 272	51,37	21 941
30	Kota Magelang	939	44,67	1 163	55,33	2 102
31	Kota Surakarta	2 353	45,06	2 869	54,94	5 222
32	Kota Salatiga	1 167	43,05	1 544	56,95	2 711
33	Kota Semarang	11 717	45,79	13 869	54,21	25 586
34	Kota Pekalongan	1 921	47,47	2 126	52,53	4 047
35	Kota Tegal	2 140	48,21	2 299	51,79	4 439
Provinsi Jawa Tengah		138 507	45,96	162 876	54,04	301 383

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6

Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	6 106	47,77	6 676	52,23	12 782
02	Kab. Banyumas	6 376	48,66	6 726	51,34	13 102
03	Kab. Purbalingga	2 418	49,41	2 476	50,59	4 894
04	Kab. Banjarnegara	2 352	46,61	2 694	53,39	5 046
05	Kab. Kebumen	2 541	43,95	3 241	56,05	5 782
06	Kab. Purworejo	1 576	41,12	2 257	58,88	3 833
07	Kab. Wonosobo	2 725	41,92	3 775	58,08	6 500
08	Kab. Magelang	2 501	39,52	3 828	60,48	6 329
09	Kab. Boyolali	3 659	41,05	5 255	58,95	8 914
10	Kab. Klaten	3 374	40,10	5 040	59,90	8 414
11	Kab. Sukoharjo	5 506	43,92	7 031	56,08	12 537
12	Kab. Wonogiri	1 772	50,99	1 703	49,01	3 475
13	Kab. Karanganyar	3 550	44,40	4 446	55,60	7 996
14	Kab. Sragen	3 966	44,51	4 945	55,49	8 911
15	Kab. Grobogan	2 122	45,60	2 532	54,40	4 654
16	Kab. Blora	2 543	47,00	2 868	53,00	5 411
17	Kab. Rembang	1 986	47,91	2 159	52,09	4 145
18	Kab. Pati	3 730	45,94	4 389	54,06	8 119
19	Kab. Kudus	2 036	45,89	2 401	54,11	4 437
20	Kab. Jepara	2 518	44,27	3 170	55,73	5 688
21	Kab. Demak	4 114	46,95	4 649	53,05	8 763
22	Kab. Semarang	2 493	44,49	3 111	55,51	5 604
23	Kab. Temanggung	1 723	45,97	2 025	54,03	3 748
24	Kab. Kendal	2 312	40,93	3 337	59,07	5 649
25	Kab. Batang	2 014	47,21	2 252	52,79	4 266
26	Kab. Pekalongan	2 979	50,30	2 944	49,70	5 923
27	Kab. Pemalang	9 520	47,63	10 468	52,37	19 988
28	Kab. Tegal	19 091	47,22	21 337	52,78	40 428
29	Kab. Brebes	10 669	48,63	11 272	51,37	21 941
30	Kota Magelang	939	44,67	1 163	55,33	2 102
31	Kota Surakarta	2 353	45,06	2 869	54,94	5 222
32	Kota Salatiga	1 168	43,02	1 547	56,98	2 715
33	Kota Semarang	11 713	45,79	13 869	54,21	25 582
34	Kota Pekalongan	1 921	47,47	2 126	52,53	4 047
35	Kota Tegal	2 140	48,21	2 299	51,79	4 439
Provinsi Jawa Tengah		138 506	45,96	162 880	54,04	301 386

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7

Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	1 452	52,31	1 324	47,69	2 776
02	Kab. Banyumas	1 795	51,49	1 691	48,51	3 486
03	Kab. Purbalingga	1 312	51,19	1 251	48,81	2 563
04	Kab. Banjarnegara	1 496	51,60	1 403	48,40	2 899
05	Kab. Kebumen	1 447	52,73	1 297	47,27	2 744
06	Kab. Purworejo	799	52,74	716	47,26	1 515
07	Kab. Wonosobo	609	52,55	550	47,45	1 159
08	Kab. Magelang	1 210	49,19	1 250	50,81	2 460
09	Kab. Boyolali	545	50,65	531	49,35	1 076
10	Kab. Klaten	1 498	51,44	1 414	48,56	2 912
11	Kab. Sukoharjo	1 825	52,47	1 653	47,53	3 478
12	Kab. Wonogiri	952	53,24	836	46,76	1 788
13	Kab. Karanganyar	692	51,34	656	48,66	1 348
14	Kab. Sragen	1 171	53,94	1 000	46,06	2 171
15	Kab. Grobogan	835	53,22	734	46,78	1 569
16	Kab. Blora	422	48,90	441	51,10	863
17	Kab. Rembang	569	55,95	448	44,05	1 017
18	Kab. Pati	1 257	52,68	1 129	47,32	2 386
19	Kab. Kudus	423	50,12	421	49,88	844
20	Kab. Jepara	767	50,53	751	49,47	1 518
21	Kab. Demak	535	54,37	449	45,63	984
22	Kab. Semarang	258	52,33	235	47,67	493
23	Kab. Temanggung	842	51,62	789	48,38	1 631
24	Kab. Kendal	854	51,95	790	48,05	1 644
25	Kab. Batang	516	55,31	417	44,69	933
26	Kab. Pekalongan	923	53,20	812	46,80	1 735
27	Kab. Pemalang	807	51,86	749	48,14	1 556
28	Kab. Tegal	802	49,75	810	50,25	1 612
29	Kab. Brebes	681	49,96	682	50,04	1 363
30	Kota Magelang	129	52,44	117	47,56	246
31	Kota Surakarta	621	57,08	467	42,92	1 088
32	Kota Salatiga	167	53,02	148	46,98	315
33	Kota Semarang	491	42,15	674	57,85	1 165
34	Kota Pekalongan	272	59,39	186	40,61	458
35	Kota Tegal	166	58,25	119	41,75	285
Provinsi Jawa Tengah		29 140	51,96	26 940	48,04	56 080

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8

Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	1 452	52,31	1 324	47,69	2 776
02	Kab. Banyumas	1 795	51,49	1 691	48,51	3 486
03	Kab. Purbalingga	1 312	51,19	1 251	48,81	2 563
04	Kab. Banjarnegara	1 496	51,60	1 403	48,40	2 899
05	Kab. Kebumen	1 447	52,73	1 297	47,27	2 744
06	Kab. Purworejo	799	52,74	716	47,26	1 515
07	Kab. Wonosobo	609	52,55	550	47,45	1 159
08	Kab. Magelang	1 210	49,19	1 250	50,81	2 460
09	Kab. Boyolali	545	50,65	531	49,35	1 076
10	Kab. Klaten	1 498	51,44	1 414	48,56	2 912
11	Kab. Sukoharjo	1 825	52,47	1 653	47,53	3 478
12	Kab. Wonogiri	1 302	49,11	1 349	50,89	2 651
13	Kab. Karanganyar	692	51,34	656	48,66	1 348
14	Kab. Sragen	1 171	53,94	1 000	46,06	2 171
15	Kab. Grobogan	835	53,22	734	46,78	1 569
16	Kab. Blora	422	48,90	441	51,10	863
17	Kab. Rembang	569	55,95	448	44,05	1 017
18	Kab. Pati	1 257	52,68	1 129	47,32	2 386
19	Kab. Kudus	423	50,12	421	49,88	844
20	Kab. Jepara	767	50,53	751	49,47	1 518
21	Kab. Demak	535	54,37	449	45,63	984
22	Kab. Semarang	258	52,33	235	47,67	493
23	Kab. Temanggung	842	51,62	789	48,38	1 631
24	Kab. Kendal	854	51,95	790	48,05	1 644
25	Kab. Batang	516	55,31	417	44,69	933
26	Kab. Pekalongan	923	53,20	812	46,80	1 735
27	Kab. Pemalang	807	51,86	749	48,14	1 556
28	Kab. Tegal	802	49,75	810	50,25	1 612
29	Kab. Brebes	681	49,96	682	50,04	1 363
30	Kota Magelang	129	52,44	117	47,56	246
31	Kota Surakarta	621	57,08	467	42,92	1 088
32	Kota Salatiga	167	53,02	148	46,98	315
33	Kota Semarang	491	42,15	674	57,85	1 165
34	Kota Pekalongan	272	59,39	186	40,61	458
35	Kota Tegal	166	58,25	119	41,75	285
Provinsi Jawa Tengah		29 490	51,79	27 453	48,21	56 943

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 9  
Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
			Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	1 488 496	1 082 186	406 310	72,70
02	Kab. Banyumas	1 350 981	1 086 983	263 998	80,46
03	Kab. Purbalingga	752 211	592 174	160 037	78,72
04	Kab. Banjarnegara	784 170	602 380	181 790	76,82
05	Kab. Kebumen	1 072 708	778 346	294 362	72,56
06	Kab. Purworejo	614 611	476 616	137 995	77,55
07	Kab. Wonosobo	679 098	544 246	134 852	80,14
08	Kab. Magelang	988 879	858 806	130 073	86,85
09	Kab. Boyolali	808 469	690 979	117 490	85,47
10	Kab. Klaten	1 004 526	826 977	177 549	82,33
11	Kab. Sukoharjo	669 546	563 185	106 361	84,11
12	Kab. Wonogiri	869 824	638 142	231 682	73,36
13	Kab. Karanganyar	695 027	589 520	105 507	84,82
14	Kab. Sragen	776 900	617 638	159 262	79,50
15	Kab. Grobogan	1 122 269	882 717	239 552	78,65
16	Kab. Blora	706 940	573 806	133 134	81,17
17	Kab. Rembang	488 042	431 460	56 582	88,41
18	Kab. Pati	1 034 791	840 301	194 490	81,20
19	Kab. Kudus	630 618	548 297	82 321	86,95
20	Kab. Jepara	876 490	733 932	142 558	83,74
21	Kab. Demak	877 343	732 308	145 035	83,47
22	Kab. Semarang	778 993	677 887	101 106	87,02
23	Kab. Temanggung	602 309	529 859	72 450	87,97
24	Kab. Kendal	778 630	650 273	128 357	83,52
25	Kab. Batang	606 290	506 194	100 096	83,49
26	Kab. Pekalongan	725 790	576 169	149 621	79,39
27	Kab. Pemalang	1 122 858	813 096	309 762	72,41
28	Kab. Tegal	1 206 180	893 660	312 520	74,09
29	Kab. Brebes	1 528 649	1 085 284	443 365	71,00
30	Kota Magelang	91 331	83 198	8 133	91,10
31	Kota Surakarta	421 999	372 061	49 938	88,17
32	Kota Salatiga	135 149	123 984	11 165	91,74
33	Kota Semarang	1 176 074	1 020 167	155 907	86,74
34	Kota Pekalongan	225 859	193 968	31 891	85,88
35	Kota Tegal	204 852	159 666	45 186	77,94
Provinsi Jawa Tengah		27 896 902	22 376 465	5 520 437	80,21

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 10  
Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR RI Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
			Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	1 488 496	1 080 701	407 795	72,60
02	Kab. Banyumas	1 350 981	1 082 627	268 354	80,14
03	Kab. Purbalingga	752 211	591 171	161 040	78,59
04	Kab. Banjarnegara	784 170	602 032	182 138	76,77
05	Kab. Kebumen	1 072 708	777 327	295 381	72,46
06	Kab. Purworejo	614 611	475 863	138 748	77,43
07	Kab. Wonosobo	679 098	543 545	135 553	80,04
08	Kab. Magelang	988 879	857 239	131 640	86,69
09	Kab. Boyolali	808 469	689 760	118 709	85,32
10	Kab. Klaten	1 004 526	825 726	178 800	82,20
11	Kab. Sukoharjo	669 546	561 657	107 889	83,89
12	Kab. Wonogiri	869 824	637 459	232 365	73,29
13	Kab. Karanganyar	695 027	588 628	106 399	84,69
14	Kab. Sragen	776 900	616 925	159 975	79,41
15	Kab. Grobogan	1 122 269	882 341	239 928	78,62
16	Kab. Blora	706 940	573 413	133 527	81,11
17	Kab. Rembang	488 042	430 898	57 144	88,29
18	Kab. Pati	1 034 791	839 688	195 103	81,15
19	Kab. Kudus	630 618	547 061	83 557	86,75
20	Kab. Jepara	876 490	733 129	143 361	83,64
21	Kab. Demak	877 343	731 632	145 711	83,39
22	Kab. Semarang	778 993	676 502	102 491	86,84
23	Kab. Temanggung	602 309	529 386	72 923	87,89
24	Kab. Kendal	778 630	649 513	129 117	83,42
25	Kab. Batang	606 290	505 610	100 680	83,39
26	Kab. Pekalongan	725 790	575 785	150 005	79,33
27	Kab. Pemalang	1 122 858	812 590	310 268	72,37
28	Kab. Tegal	1 206 180	892 993	313 187	74,03
29	Kab. Brebes	1 528 649	1 084 689	443 960	70,96
30	Kota Magelang	91 331	82 198	9 133	90,00
31	Kota Surakarta	421 999	368 740	53 259	87,38
32	Kota Salatiga	135 149	122 102	13 047	90,35
33	Kota Semarang	1 176 074	1 008 078	167 996	85,72
34	Kota Pekalongan	225 859	193 536	32 323	85,69
35	Kota Tegal	204 852	159 124	45 728	77,68
Provinsi Jawa Tengah		27 896 902	22 329 668	5 567 234	80,04

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 11

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Sah	Tidak Sah	Jumlah	Suara Tidak Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	1 065 010	17 176	1 082 186	1,59
02	Kab. Banyumas	1 066 768	20 215	1 086 983	1,86
03	Kab. Purbalingga	572 760	19 414	592 174	3,28
04	Kab. Banjarnegara	581 891	20 489	602 380	3,40
05	Kab. Kebumen	754 752	23 594	778 346	3,03
06	Kab. Purworejo	463 498	13 118	476 616	2,75
07	Kab. Wonosobo	520 900	23 346	544 246	4,29
08	Kab. Magelang	831 687	27 119	858 806	3,16
09	Kab. Boyolali	675 941	15 038	690 979	2,18
10	Kab. Klaten	812 476	14 501	826 977	1,75
11	Kab. Sukoharjo	552 115	11 071	563 186	1,97
12	Kab. Wonogiri	625 539	12 603	638 142	1,97
13	Kab. Karanganyar	578 754	10 766	589 520	1,83
14	Kab. Sragen	599 896	17 742	617 638	2,87
15	Kab. Grobogan	860 423	22 294	882 717	2,53
16	Kab. Blora	553 274	20 532	573 806	3,58
17	Kab. Rembang	408 612	22 848	431 460	5,30
18	Kab. Pati	814 127	26 174	840 301	3,11
19	Kab. Kudus	531 798	16 499	548 297	3,01
20	Kab. Jepara	710 036	23 896	733 932	3,26
21	Kab. Demak	706 811	25 497	732 308	3,48
22	Kab. Semarang	659 636	18 251	677 887	2,69
23	Kab. Temanggung	515 117	14 742	529 859	2,78
24	Kab. Kendal	627 739	22 534	650 273	3,47
25	Kab. Batang	487 775	18 419	506 194	3,64
26	Kab. Pekalongan	558 864	17 305	576 169	3,00
27	Kab. Pemasang	789 975	23 121	813 096	2,84
28	Kab. Tegal	869 677	23 983	893 660	2,68
29	Kab. Brebes	1 057 976	27 308	1 085 284	2,52
30	Kota Magelang	81 411	1 787	83 198	2,15
31	Kota Surakarta	367 266	4 795	372 061	1,29
32	Kota Salatiga	121 322	2 662	123 984	2,15
33	Kota Semarang	1 002 237	17 930	1 020 167	1,76
34	Kota Pekalongan	188 103	5 871	193 974	3,03
35	Kota Tegal	155 792	3 874	159 666	2,43
Provinsi Jawa Tengah		21 769 958	606 514	22 376 472	2,71

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12

Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut  
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Jokowi-Amin		Prabowo-Sandi		Suara Tidak Sah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	775 304	72,80	289 706	27,20	17 176
02	Kab. Banyumas	792 150	74,26	274 618	25,74	20 215
03	Kab. Purbalingga	420 065	73,34	152 695	26,66	19 414
04	Kab. Banjarnegara	410 658	70,57	171 233	29,43	20 489
05	Kab. Kebumen	545 742	72,31	209 010	27,69	23 594
06	Kab. Purworejo	342 173	73,82	121 325	26,18	13 118
07	Kab. Wonosobo	413 065	79,30	107 835	20,70	23 346
08	Kab. Magelang	601 147	72,28	230 540	27,72	27 119
09	Kab. Boyolali	581 477	86,02	94 464	13,98	15 038
10	Kab. Klaten	647 486	79,69	164 990	20,31	14 501
11	Kab. Sukoharjo	424 891	76,96	127 224	23,04	11 071
12	Kab. Wonogiri	528 377	84,47	97 162	15,53	12 603
13	Kab. Karanganyar	464 301	80,22	114 453	19,78	10 766
14	Kab. Sragen	485 538	80,94	114 358	19,06	17 742
15	Kab. Grobogan	735 446	85,47	124 977	14,53	22 294
16	Kab. Blora	448 575	81,08	104 699	18,92	20 532
17	Kab. Rembang	320 793	78,51	87 819	21,49	22 848
18	Kab. Pati	698 276	85,77	115 851	14,23	26 174
19	Kab. Kudus	407 983	76,72	123 815	23,28	16 499
20	Kab. Jepara	595 368	83,85	114 668	16,15	23 896
21	Kab. Demak	545 562	77,19	161 249	22,81	25 497
22	Kab. Semarang	536 938	81,40	122 698	18,60	18 251
23	Kab. Temanggung	412 957	80,17	102 160	19,83	14 742
24	Kab. Kendal	493 100	78,55	134 639	21,45	22 534
25	Kab. Batang	395 779	81,14	91 996	18,86	18 419
26	Kab. Pekalongan	447 207	80,02	111 657	19,98	17 305
27	Kab. Pemalang	595 759	75,41	194 216	24,59	23 121
28	Kab. Tegal	549 992	63,24	319 685	36,76	23 983
29	Kab. Brebes	739 743	69,92	318 233	30,08	27 308
30	Kota Magelang	56 143	68,96	25 268	31,04	1 787
31	Kota Surakarta	301 995	82,23	65 271	17,77	4 795
32	Kota Salatiga	94 727	78,08	26 595	21,92	2 662
33	Kota Semarang	781 471	77,97	220 766	22,03	17 930
34	Kota Pekalongan	138 319	73,53	49 784	26,47	5 871
35	Kota Tegal	97 004	62,27	58 788	37,73	3 874
Provinsi Jawa Tengah		16 825 511	77,29	4 944 447	22,71	606 514

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 13  
Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah  
Menurut Daerah Pemilihan, 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
			Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	1 506 203	1 080 701	425 502	71,75
02	Kab. Banyumas	1 373 769	1 082 627	291 142	78,81
03	Kab. Purbalingga	752 211	591 171	161 040	78,59
04	Kab. Banjarnegara	784 170	602 032	182 138	76,77
05	Kab. Kebumen	1 072 708	777 327	295 381	72,46
06	Kab. Purworejo	614 611	475 783	138 828	77,41
07	Kab. Wonosobo	679 098	543 518	135 580	80,04
08	Kab. Magelang	988 879	857 144	131 735	86,68
09	Kab. Boyolali	808 469	689 683	118 786	85,31
10	Kab. Klaten	1 015 969	825 678	190 291	81,27
11	Kab. Sukoharjo	684 757	561 623	123 134	82,02
12	Kab. Wonogiri	875 150	637 459	237 691	72,84
13	Kab. Karanganyar	705 533	588 628	116 905	83,43
14	Kab. Sragen	787 686	616 925	170 761	78,32
15	Kab. Grobogan	1 122 269	882 320	239 949	78,62
16	Kab. Blora	706 940	573 376	133 564	81,11
17	Kab. Rembang	488 042	430 839	57 203	88,28
18	Kab. Pati	1 034 791	839 627	195 164	81,14
19	Kab. Kudus	630 618	547 061	83 557	86,75
20	Kab. Jepara	876 490	733 187	143 303	83,65
21	Kab. Demak	877 343	731 630	145 713	83,39
22	Kab. Semarang	778 993	676 349	102 644	86,82
23	Kab. Temanggung	602 309	529 316	72 993	87,88
24	Kab. Kendal	778 630	649 456	129 174	83,41
25	Kab. Batang	606 290	505 610	100 680	83,39
26	Kab. Pekalongan	725 790	575 781	150 009	79,33
27	Kab. Pemalang	1 122 858	812 590	310 268	72,37
28	Kab. Tegal	1 206 180	892 986	313 194	74,03
29	Kab. Brebes	1 528 649	1 084 689	443 960	70,96
30	Kota Magelang	91 331	82 099	9 232	89,89
31	Kota Surakarta	421 999	368 631	53 368	87,35
32	Kota Salatiga	135 149	122 055	13 094	90,31
33	Kota Semarang	1 176 074	1 007 518	168 556	85,67
34	Kota Pekalongan	225 859	193 536	32 323	85,69
35	Kota Tegal	204 852	159 124	45 728	77,68
Provinsi Jawa Tengah		27 990 669	22 328 079	5 662 590	79,77

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14

## Jumlah Anggota DPRD Menurut Kabupaten/Kota dan Asal Partai

No	Kabupaten/Kota	Nasdem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	Gerindra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Kab. Cilacap	-	8	4	10	8	6
02	Kab. Banyumas	2	8	4	17	6	7
03	Kab. Purbalingga	1	9	4	10	7	6
04	Kab. Banjarnegara	4	7	5	9	4	3
05	Kab. Kebumen	4	9	2	12	6	7
06	Kab. Purworejo	5	5	2	10	8	5
07	Kab. Wonosobo	3	10	-	11	4	6
08	Kab. Magelang	2	8	6	13	6	7
09	Kab. Boyolali	-	2	3	35	4	1
10	Kab. Klaten	1	4	5	19	7	5
11	Kab. Sukoharjo	1	3	5	20	5	5
12	Kab. Wonogiri	-	3	4	28	8	4
13	Kab. Karanganyar	-	5	5	13	12	4
14	Kab. Sragen	1	7	6	13	6	5
15	Kab. Grobogan	-	7	3	19	3	5
16	Kab. Blora	7	8	3	9	5	2
17	Kab. Rembang	7	8	3	6	1	3
18	Kab. Pati	5	6	3	10	5	6
19	Kab. Kudus	4	7	4	8	7	6
20	Kab. Jepara	7	6	2	8	4	5
21	Kab. Demak	6	9	-	11	7	8
22	Kab. Semarang	3	5	4	16	4	4
23	Kab. Temanggung	2	7	3	9	6	5
24	Kab. Kendal	2	10	2	10	3	6
25	Kab. Batang	2	10	1	8	8	5
26	Kab. Pekalongan	-	15	1	11	4	5
27	Kab. Pemasang	-	10	6	15	6	6
28	Kab. Tegal	1	14	2	12	6	7
29	Kab. Brebes	-	8	6	11	7	5
30	Kota Magelang	-	3	3	9	3	1
31	Kota Surakarta	-	-	5	30	3	3
32	Kota Salatiga	1	4	4	8	1	4
33	Kota Semarang	2	4	6	19	3	6
34	Kota Pekalongan	1	7	3	5	9	2
35	Kota Tegal	-	6	4	7	5	3
Provinsi Jawa Tengah		3	20	10	42	12	13

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14 (Lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Demokrat	PAN	PPP	Hanura	Partai Perindo	Partai Indonesia
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01	Kab. Cilacap	4	6	4	-	-	-
02	Kab. Banyumas	2	2	2	-	-	-
03	Kab. Purbalingga	2	4	2	-	-	-
04	Kab. Banjarnegara	7	4	5	2	-	-
05	Kab. Kebumen	3	3	4	-	-	-
06	Kab. Purworejo	6	1	2	1	-	-
07	Kab. Wonosobo	3	2	3	2	-	1
08	Kab. Magelang	1	3	4	-	-	-
09	Kab. Boyolali	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Klaten	3	4	2	-	-	-
11	Kab. Sukoharjo	-	6	-	-	-	-
12	Kab. Wonogiri	-	3	-	-	-	-
13	Kab. Karanganyar	3	3	-	-	-	-
14	Kab. Sragen	5	2	-	-	-	-
15	Kab. Grobogan	2	2	4	4	-	-
16	Kab. Blora	3	-	5	2	-	-
17	Kab. Rembang	4	1	10	2	-	-
18	Kab. Pati	6	-	5	3	1	-
19	Kab. Kudus	2	3	2	2	-	-
20	Kab. Jepara	2	2	10	1	2	-
21	Kab. Demak	3	1	5	-	-	-
22	Kab. Semarang	2	4	6	2	-	-
23	Kab. Temanggung	1	5	5	2	-	-
24	Kab. Kendal	3	3	5	-	1	-
25	Kab. Batang	2	2	5	2	-	-
26	Kab. Pekalongan	-	4	5	-	-	-
27	Kab. Pemalang	-	-	7	-	-	-
28	Kab. Tegal	2	1	3	1	1	-
29	Kab. Brebes	4	5	3	1	-	-
30	Kota Magelang	3	-	-	2	-	-
31	Kota Surakarta	-	3	-	-	-	-
32	Kota Salatiga	3	-	-	-	-	-
33	Kota Semarang	6	2	-	-	-	-
34	Kota Pekalongan	-	3	4	1	-	-
35	Kota Tegal	2	3	-	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah		5	6	9	-	-	-

Tabel 14 (Lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Berkarya	Partai Persatuan Indonesia	Partai Solidaritas Indonesia	Total
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	Kab. Cilacap	-	-	-	50
02	Kab. Banyumas	-	-	-	50
03	Kab. Purbalingga	-	-	-	45
04	Kab. Banjarnegara	-	-	-	50
05	Kab. Kebumen	-	-	-	50
06	Kab. Purworejo	-	-	-	45
07	Kab. Wonosobo	-	-	-	45
08	Kab. Magelang	-	-	-	50
09	Kab. Boyolali	-	-	-	45
10	Kab. Klaten	-	-	-	50
11	Kab. Sukoharjo	-	-	-	45
12	Kab. Wonogiri	-	-	-	50
13	Kab. Karanganyar	-	-	-	45
14	Kab. Sragen	-	-	-	45
15	Kab. Grobogan	1	-	-	50
16	Kab. Blora	-	1	-	45
17	Kab. Rembang	-	-	-	45
18	Kab. Pati	-	-	-	50
19	Kab. Kudus	-	-	-	45
20	Kab. Jepara	1	-	-	50
21	Kab. Demak	-	-	-	50
22	Kab. Semarang	-	-	-	50
23	Kab. Temanggung	-	-	-	45
24	Kab. Kendal	-	-	-	45
25	Kab. Batang	-	-	-	45
26	Kab. Pekalongan	-	-	-	45
27	Kab. Pemalang	-	-	-	50
28	Kab. Tegal	-	-	-	50
29	Kab. Brebes	-	-	-	50
30	Kota Magelang	-	1	-	25
31	Kota Surakarta	-	-	1	45
32	Kota Salatiga	-	-	-	25
33	Kota Semarang	-	-	2	50
34	Kota Pekalongan	-	-	-	35
35	Kota Tegal	-	-	-	30
Provinsi Jawa Tengah		-	-	-	120

Tabel 15

Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, Periode 2019 - 2024

No	Fraksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDI Perjuangan	32	10	42
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16	4	20
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	12	1	13
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	10	2	12
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	1	10
6	Partai Demokrat (PD)	4	1	5
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	3	9
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	1	6
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	-	3
Jumlah		97	23	120

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 16  
Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Pendidikan,  
Periode 2019 - 2024

No	Fraksi	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D1 - D3	D4/S1	S2-S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDI Perjuangan	11	-	16	15	42
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	-	12	5	20
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2	-	6	5	13
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	-	5	5	12
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	1	4	5	10
6	Partai Demokrat (PD)	-	-	1	4	5
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	1	5	3	9
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	-	4	-	6
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	-	-	3	-	3
Jumlah		20	2	56	42	120

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 17

Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2017 - 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kab. Cilacap	22	20	10
02	Kab. Banyumas	8	11	19
03	Kab. Purbalingga	18	28	33
04	Kab. Banjarnegara	32	10	24
05	Kab. Kebumen	20	11	10
06	Kab. Purworejo	22	25	23
07	Kab. Wonosobo	15	17	6
08	Kab. Magelang	21	13	9
09	Kab. Boyolali	20	21	22
10	Kab. Klaten	27	30	15
11	Kab. Sukoharjo	10	10	14
12	Kab. Wonogiri	11	13	15
13	Kab. Karanganyar	11	13	26
14	Kab. Sragen	10	11	19
15	Kab. Grobogan	12	12	8
16	Kab. Blora	25	24	21
17	Kab. Rembang	8	12	16
18	Kab. Pati	12	17	13
19	Kab. Kudus	21	3	8
20	Kab. Jepara	16	13	10
21	Kab. Demak	6	17	15
22	Kab. Semarang	14	16	10
23	Kab. Temanggung	18	15	19
24	Kab. Kendal	13	7	13
25	Kab. Batang	13	10	14
26	Kab. Pekalongan	20	10	5
27	Kab. Pemalang	18	18	19
28	Kab. Tegal	13	8	8
29	Kab. Brebes	11	11	11
30	Kota Magelang	13	20	12
31	Kota Surakarta	15	13	12
32	Kota Salatiga	8	7	6
33	Kota Semarang	16	9	8
34	Kota Pekalongan	19	19	13
35	Kota Tegal	14	13	4
Provinsi Jawa Tengah		6	14	17

Sumber: Biro Hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 18

Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2017 - 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kab. Cilacap	3	2	4
02	Kab. Banyumas	8	3	5
03	Kab. Purbalingga	5	5	4
04	Kab. Banjarnegara	6	7	4
05	Kab. Kebumen	3	0	1
06	Kab. Purworejo	7	12	10
07	Kab. Wonosobo	5	2	0
08	Kab. Magelang	4	0	0
09	Kab. Boyolali	10	8	8
10	Kab. Klaten	0	0	0
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0
12	Kab. Wonogiri	3	5	4
13	Kab. Karanganyar	2	2	2
14	Kab. Sragen	7	4	6
15	Kab. Grobogan	0	0	2
16	Kab. Blora	3	7	5
17	Kab. Rembang	2	2	1
18	Kab. Pati	12	5	1
19	Kab. Kudus	0	1	0
20	Kab. Jepara	0	0	1
21	Kab. Demak	0	5	5
22	Kab. Semarang	0	0	0
23	Kab. Temanggung	4	3	4
24	Kab. Kendal	5	3	5
25	Kab. Batang	4	0	0
26	Kab. Pekalongan	1	5	2
27	Kab. Pemasang	5	3	0
28	Kab. Tegal	9	4	0
29	Kab. Brebes	1	0	1
30	Kota Magelang	1	2	0
31	Kota Surakarta	2	2	2
32	Kota Salatiga	4	4	6
33	Kota Semarang	5	4	0
34	Kota Pekalongan	3	8	4
35	Kota Tegal	0	0	0
Provinsi Jawa Tengah		4	8	7

Sumber: Biro Hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 19

Jumlah Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta Menurut Kabupaten/Kota, 2018 - 2019

No	Kabupaten/Kota	Polres/Polresta		Polsek/Polsekta	
		2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	1	1	24	24
02	Kab. Banyumas	1	1	27	27
03	Kab. Purbalingga	1	1	16	16
04	Kab. Banjarnegara	1	1	20	20
05	Kab. Kebumen	1	1	26	26
06	Kab. Purworejo	1	1	16	16
07	Kab. Wonosobo	1	1	14	14
08	Kab. Magelang	1	1	20	20
09	Kab. Boyolali	1	1	19	19
10	Kab. Klaten	1	1	24	24
11	Kab. Sukoharjo	1	1	12	12
12	Kab. Wonogiri	1	1	25	25
13	Kab. Karanganyar	1	1	17	17
14	Kab. Sragen	1	1	20	20
15	Kab. Grobogan	1	1	19	19
16	Kab. Blora	1	1	16	16
17	Kab. Rembang	1	1	14	14
18	Kab. Pati	1	1	20	20
19	Kab. Kudus	1	1	9	9
20	Kab. Jepara	1	1	16	16
21	Kab. Demak	1	1	14	14
22	Kab. Semarang	1	1	16	16
23	Kab. Temanggung	1	1	14	14
24	Kab. Kendal	1	1	17	17
25	Kab. Batang	1	1	12	12
26	Kab. Pekalongan	1	1	15	15
27	Kab. Pemalang	1	1	14	14
28	Kab. Tegal	1	1	18	18
29	Kab. Brebes	1	1	17	17
30	Kota Magelang	1	1	4	4
31	Kota Surakarta	1	1	5	5
32	Kota Salatiga	1	1	4	4
33	Kota Semarang	1	1	17	17
34	Kota Pekalongan	1	1	6	6
35	Kota Tegal	1	1	4	4
Polda Jawa Tengah		35	35	551	551

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Tabel 20

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resor di Provinsi Jawa Tengah, 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	341	1	91	1:41:21
02	Kab. Banyumas	1 120	3,2	40	7:49:17
03	Kab. Purbalingga	180	0,5	86	0:40:00
04	Kab. Banjarnegara	165	0,5	87	5:05:27
05	Kab. Kebumen	222	0,6	95	15:27:34
06	Kab. Purworejo	150	0,4	95	10:24:00
07	Kab. Wonosobo	123	0,4	75	23:13:10
08	Kab. Magelang	360	1	70	0:20:00
09	Kab. Boyolali	381	1,1	44	22:59:32
10	Kab. Klaten	366	1,1	60	23:56:04
11	Kab. Sukoharjo	340	1	57	1:45:53
12	Kab. Wonogiri	223	0,6	65	15:16:57
13	Kab. Karanganyar	149	0,4	89	10:47:31
14	Kab. Sragen	279	0,8	65	7:23:52
15	Kab. Grobogan	144	0,4	79	12:50:00
16	Kab. Blora	110	0,3	90	7:38:11
17	Kab. Rembang	115	0,3	100	4:10:26
18	Kab. Pati	327	0,9	50	2:47:20
19	Kab. Kudus	196	0,6	78	20:41:38
20	Kab. Jepara	305	0,9	64	4:43:17
21	Kab. Demak	186	0,5	77	23:05:48
22	Kab. Semarang	238	0,7	66	12:48:24
23	Kab. Temanggung	122	0,4	84	23:48:12
24	Kab. Kendal	139	0,4	71	15:01:18
25	Kab. Batang	217	0,6	92	16:22:07
26	Kab. Pekalongan	118	0,5	79	22:35:45
27	Kab. Pemalang	213	0,6	85	17:07:36
28	Kab. Tegal	208	0,6	80	18:06:55
29	Kab. Brebes	102	0,3	77	13:52:56
30	Kota Magelang	147	0,4	76	11:35:31
31	Kota Surakarta	733	2,1	64	11:57:03
32	Kota Salatiga	201	0,6	91	19:34:56
33	Kota Semarang	1 554	4,5	45	5:38:13
34	Kota Pekalongan	200	0,6	75	19:48:00
35	Kota Tegal	180	0,5	52	0:40:00
Polda Jawa Tengah		10 224	29,6	65	0:51:25

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes POLRI

Tabel 21  
 Banyaknya Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total), Kejahatan yang Diselesaikan (Crime Cleared),  
 Indeks Kejahatan yang Dilaporkan dan Indeks Kejahatan yang Diselesaikan  
 Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes 2019

No	Kabupaten/Kota	Kejahatan yang Dilaporkan	Kejahatan yang Diselesaikan	Indeks Kejahatan Dilaporkan	Indeks Kejahatan Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	341	311	275	248
02	Kab. Banyumas	1 120	452	887	341
03	Kab. Purbalingga	180	155	137	114
04	Kab. Banjarnegara	165	144	142	113
05	Kab. Kebumen	222	212	157	147
06	Kab. Purworejo	150	143	102	100
07	Kab. Wonosobo	123	92	79	53
08	Kab. Magelang	360	252	218	137
09	Kab. Boyolali	381	169	265	124
10	Kab. Klaten	366	219	260	156
11	Kab. Sukoharjo	340	193	189	117
12	Kab. Wonogiri	223	144	128	71
13	Kab. Karanganyar	149	132	103	103
14	Kab. Sragen	279	180	229	161
15	Kab. Grobogan	144	114	162	143
16	Kab. Blora	110	99	101	94
17	Kab. Rembang	115	115	71	71
18	Kab. Pati	327	165	285	189
19	Kab. Kudus	196	153	128	115
20	Kab. Jepara	305	194	194	106
21	Kab. Demak	186	143	124	106
22	Kab. Semarang	238	158	195	128
23	Kab. Temanggung	122	103	89	76
24	Kab. Kendal	139	99	140	113
25	Kab. Batang	217	200	159	140
26	Kab. Pekalongan	118	148	134	99
27	Kab. Pemalang	213	182	132	110
28	Kab. Tegal	208	167	158	139
29	Kab. Brebes	102	79	63	58
30	Kota Magelang	147	111	81	65
31	Kota Surakarta	733	472	439	292
32	Kota Salatiga	201	183	102	107
33	Kota Semarang	1 554	698	969	474
34	Kota Pekalongan	200	150	172	129
35	Kota Tegal	180	94	127	74
Polda Jawa Tengah		10 224	6625	7 196	4 813

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes POLRI

Tabel 22  
Banyaknya Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Wilayah Polda Jawa Tengah 2019

No	Kabupaten/Kota	Poskamling		
		Aktif	Pasif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kab. Cilacap	3 218	2 801	6 019
02	Kab. Banyumas	3 836	15	3 851
03	Kab. Purbalingga	1 616	605	2 221
04	Kab. Banjarnegara	1 215	717	1 932
05	Kab. Kebumen	1 269	1 792	3 061
06	Kab. Purworejo	1 569	689	2 258
07	Kab. Wonosobo	25	881	906
08	Kab. Magelang	652	604	1 256
09	Kab. Boyolali	1 065	2 586	3 651
10	Kab. Klaten	1 811	2 322	4 133
11	Kab. Sukoharjo	1 732	1 404	3 136
12	Kab. Wonogiri	3 465	59	3 524
13	Kab. Karanganyar	1 331	1 086	2 417
14	Kab. Sragen	1 401	408	1 809
15	Kab. Grobogan	1 058	2 214	3 272
16	Kab. Blora	594	1 127	1 721
17	Kab. Rembang	450	847	1 297
18	Kab. Pati	472	1 847	2 319
19	Kab. Kudus	309	590	899
20	Kab. Jepara	902	1 582	2 484
21	Kab. Demak	1 043	1 783	2 826
22	Kab. Semarang	1 909	4 535	6 444
23	Kab. Temanggung	504	773	1 277
24	Kab. Kendal	875	17	892
25	Kab. Batang	465	495	960
26	Kab. Pekalongan	759	384	1 143
27	Kab. Pemalang	529	1 587	2 116
28	Kab. Tegal	503	673	1 176
29	Kab. Brebes	444	28	472
30	Kota Magelang	652	139	791
31	Kota Surakarta	982	267	1 249
32	Kota Salatiga	177	437	614
33	Kota Semarang	1 795	826	2 621
34	Kota Pekalongan	682	139	821
35	Kota Tegal	53	132	185
Polda Jawa Tengah		39 362	36 391	75 753

Sumber: Bidang TI Subbid Tek Info Polda Jawa Tengah

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Safa'at, Ali (2011), "*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*" Jakarta: Rajagrafindo.
- Surbakti, Ramlan dkk (2008), "*Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*" Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah



## Referensi Internet

<http://www.bps.go.id>

<http://www.dprd.jatengprov.go.id>

<https://jateng.bps.go.id/>

<https://jateng.kpu.go.id/2019/05/pengumuman/hasil-rekap-penghitungan-perolehan-suara-tingkat-provinsi/>

<http://www.kpu-jatengprov.go.id/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019)

<https://jateng.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241  
Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195  
Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail: [jateng@bps.go.id](mailto:jateng@bps.go.id)

ISSN: 2715-3738



9 772715 373007